



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

**Fakultas Ekonomi UNS NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
TERKAIT FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH**

SUTARYO

Alumni Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS

BAMBANG SUTOPO

Fakultas Ekonomi UNS

DODDY SETIAWAN

Abstract

The aim of this research is examining value relevance of local government's financial statement. This research investigates value relevance using the effect of local government financial ratio: financial performance ratio, financial position ratio, efficiency ratio and debt ratio on local government financial distress in the next one and two year. The definition of local government financial distress using Peraturan Pemerintah No.54/2005. Local government categorized as distress condition if they do not meet the requirement from PP No.54. The samples of this research is local government financial statement from 2005-2007 from www.bpk.go.id. We collect 232 financial statement/years. This research use binary regression to test the hypothesis. The result shows that ROA, POS_{GW}, CL_{GW}, LQ, CL and LTDA effect the probability of local government financial distress in the next one year, while PER_{GW}, LCO, LTDA and DTR effect the probability of financial distress in the next two year. Based on the results, Indonesian local government have value relevance information.

Keywords: value relevance, local government financial statements, local government financial ratio, financial distress.



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*).

Berbagai penelitian empiris akuntansi menguji nilai relevan (*value relevant*) atribut akuntansi dalam rangka mempertinggi analisis laporan keuangan. Altman (1968) menggunakan data akuntansi dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan berupa rasio-rasio keuangan sebagai variabel diskriminator dan prediktor kegagalan keuangan perusahaan. Gordon dan Jordan (1988) mengembangkan model *multiple discriminant* untuk memprediksi bank yang menghadapi permasalahan keuangan. Platt dan Platt (2002) dengan model *logit* memperoleh bukti empiris bahwa *EBITDA/sales*, *current assets/current liabilities* dan *cash flow growth rate* memiliki hubungan negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Sementara itu,

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Zu'amroh (2005) menggunakan model prediksi kepailitan yang dibangun dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dimaksudkan sebagai representasi kondisi keuangan perusahaan dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yaitu memprediksi kepailitan suatu perusahaan.

Bukti empiris terkait nilai relevan dalam laporan keuangan pemerintah diperoleh Ingram et al. (1987) yang menghubungkan informasi laporan keuangan dengan risiko kegagalan pemerintah yang diukur dengan *bond rating* dan *yield* atas obligasi pemerintah. Reck et al. (2004) menguji hal yang sama, tetapi dengan menggunakan ukuran risiko kegagalan *interest cost*. Plammer et al. (2007) memperoleh bukti empiris bahwa *total net asset* yang diukur dengan dasar akrual basis mampu meningkatkan kualitas informasi dalam neraca. Jones dan Walker (2007) menggunakan tiga variabel independen berupa: *council characteristic*, *infrastructure* dan *financial variables* dengan bukti bahwa variabel *council characteristic* yang diukur dengan jumlah penduduk dan *financial variables* yang diukur dengan pendapatan daerah berpengaruh terhadap *local government distress*.

Penelitian ini menguji nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah terkait *financial distress* pemerintah daerah. *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007). Terkait kesulitan keuangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi

pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu nilai *debt service coverage ratio* minimal 2,5.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio keuangan mempunyai nilai relevan terkait kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia berdasar Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah.

A. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Pengertian *Financial Distress*

Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Untuk menguji kondisi *financial distress*, menurut Foster (1994) ada dua model pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: *univariate model of distress prediction* yang menggunakan dua asumsi kunci dalam model prediksi ini, yaitu: (a) perbedaan distribusi variabel di antara entitas dalam kondisi *financial distress* dan *non distress* dan (b) variabel yang berbeda tersebut dapat dikembangkan untuk tujuan prediksi kondisi *financial distress*. Pendekatan yang lain adalah *multivariate model of distress prediction* yang menggunakan variabel dependen berupa kelompok seperti kelompok bangkrut dan kelompok *non bangkrut* atau kemungkinan mengalami

kebangkrutan. Biasanya pendekatan ini menggunakan rasio keuangan untuk pengujiannya. *Issue* yang berkembang pada pendekatan ini meliputi variabel yang seharusnya masuk dalam model prediksi dan model yang seharusnya digunakan.

2. Informasi Laporan Keuangan dan *Financial Distress*

Beberapa peneliti berusaha mengembangkan sistem peringatan awal *financial distress* dengan menggunakan rasio-rasio dalam laporan keuangan. Barnes (1987) dan Ohlson (1980) menggunakan analisis *logit* dan *probit* untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dengan hasil penelitian bahwa kedua analisis baik analisis *logit* maupun *probit* dapat digunakan untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Plummer et al. (2007) menghubungkan risiko kegagalan dan variabel akuntansi yang membentuk laporan keuangan pemerintah. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah risiko kegagalan distrik sekolah (*school district's default risk*) dan beberapa variabel akuntansi yang menjadi komponen laporan keuangan, meliputi; *total net asset* untuk mengukur posisi keuangan, *revenues minus expense* untuk mengukur kinerja keuangan dan *current liabilities*. Plummer et al. (2007) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *total net asset* dalam laporan keuangan dengan dasar akrual basis menyediakan peningkatan informasi dalam neraca, sementara itu, untuk *revenues minus expense* dan *current liabilities* tidak menyediakan peningkatan informasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ukuran *total net asset* dengan dasar akrual basis dalam neraca dan modifikasi akrual basis untuk *revenues minus expense* dapat menyediakan informasi untuk menjelaskan risiko kegagalan distrik sekolah.



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Jones dan Walker (2007) melakukan pengujian *local government distress* di Australia dengan menggunakan tiga variabel berupa: *council characteristic*, *local service delivery*, *infrastructure* dan *financial variables*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi *local government distress* yaitu jumlah penduduk dan jumlah pendapatan daerah yang merupakan ukuran-ukuran dalam *financial variables*.

3. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Steven dan McGowen (1983) menggunakan variabel indikator kinerja keuangan berupa rasio *external reliance measure*. Salah satu indikator keuangan yang digunakan adalah rasio terkait *revenue*, *expenditure* yang menggambarkan kinerja keuangan pemerintah. Ryan et al. (2000) menggunakan indikator kinerja keuangan *revenue flexibility/intensity*. Cohen (2006) menggunakan indikator kinerja keuangan berupa ROE, ROA dan *profit margin* dalam penelitian yang dilakukannya yang membuktikan bahwa kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk. Plammer et al. (2007) melakukan penelitian terkait risiko kegagalan keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah berupa kinerja keuangan dari anggaran pemerintah (PER_{GW}) dan

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

kinerja keuangan pemerintah dari ekuitas dana (PER_{FUND}) dengan bukti yang diperoleh bahwa PER_{GW} dan PER_{FUND} berpengaruh terhadap *bond rating* sebagai proksi kegagalan keuangan pemerintah. Jones dan Walker (2007) menggunakan *financial variable* dalam penelitian *local government distress* di Australia. Salah satu rasio dalam *financial variable* tersebut adalah rasio kinerja pemerintah berupa ROA dan *net income (surplus) by annual interest payment (Nicovert)* yang berpengaruh terhadap *government local distress*.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio *performance government wealth, performance fund* (Plammer et al. 2007), ROE, ROA dan *profit margin* (Cohen, 2006) yang menggunakan jumlah surplus atau defisit atas realisasi atas APBD. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah tersebut mempunyai angka rasio kinerja keuangan yang tinggi. Namun demikian selisih (surplus) yang tinggi tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode berikutnya. Surplus yang dihasilkan pemerintah daerah tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan pemerintah daerah bersangkutan hanya diperbolehkan mengajukan anggaran pada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya. Oleh karena alasan tersebut, maka pemerintah daerah yang mempunyai surplus yang tinggi hingga mempunyai probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress* sehingga tidak mampu menyediakan pelayanan pada publik sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Ha₁: Rasio kinerja keuangan *performance government wealth* (PER_{GW}), *performance fund* (PER_{FUND}), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA) dan *profit margin* (PM) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

b. Pengaruh Rasio Posisi Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Plammer et al. (2007) menggunakan dua indikator posisi keuangan pemerintah berupa *position government wealth* (POS_{GW}) dan *position fund* (POS_{FUND}). Hasil penelitian membuktikan bahwa kedua indikator posisi keuangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegagalan keuangan pemerintah. Kedua indikator keuangan tersebut menggambarkan jumlah perbandingan komponen laporan keuangan untuk menilai posisi keuangan pemerintah melalui laporan keuangan pemerintah. POS_{FUND} merupakan perbandingan antara jumlah total *fund balance* dengan jumlah total *fund revenue*. Rasio ini menggambarkan jumlah total dana pemerintah atas jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah dana yang tinggi hingga mampu membiayai proses kegiatan pemerintah dalam menyediakan pelayanan, sehingga semakin kecil kemungkinan daerah mengalami *financial distress*. POS_{GW} merupakan gambaran dari perbandingan antara jumlah *net asset* dengan jumlah *total revenue*. Angka rasio POS_{GW} yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik dan infrastruktur tersebut didanai dari pendapatan asli daerah, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, semakin



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

Ha₂: *Position fund ratio* (POS_{FUND}) dan *position government wealth ratio* (POS_{GW}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

c. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress*

Menurut Halim dan Damayanti (2008) efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu, atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Jadi, efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara *output* dengan *input* (biaya). Cohen (2006) melakukan penelitian terkait dengan rasio efisiensi yang terjadi dalam pemerintah berupa: *total expenditure to total revenues* (ETR) dan *fixed cost to operating revenue* (FETOR). ETR merupakan perbandingan antara jumlah total pengeluaran dengan jumlah total pendapatan Pemerintah. Angka rasio ETR yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai pengeluaran yang tinggi dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak efisien serta mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*. FETOR merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran tetap (rutin) dengan jumlah pendapatan asli daerah. Angka rasio FETOR yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menanggung pengeluaran tetap yang tinggi dengan pendapatan asli daerah yang rendah. Kondisi ini dapat

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

dinyatakan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi yang tidak efisien dan mempunyai probabilitas tinggi untuk mengalami *financial distress*.

Groves et al. (2001) juga menggunakan rasio efisiensi pemerintah pada penelitian yang dilakukannya. Rasio yang digunakan Groves et al. (2001) tersebut adalah *debt service to asset* (DSA), *maintenance effort* (ME) dan *level of capital outlay* (LCO). *Debt service to asset* (DSA) merupakan perbandingan antara jumlah total pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap jumlah *total asset*. Rasio ini menggambarkan jumlah *asset* yang digunakan untuk menutup jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah *asset* pemerintah daerah yang digunakan dalam pembayaran pokok pinjaman dan bunga, sehingga dapat dinyatakan pemerintah dalam kondisi tidak efisien mempunyai probabilitas tinggi untuk mengalami *financial distress*. *Maintenance effort* (ME) merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap jumlah *total asset* pemerintah daerah. Angka rasio *maintenance effort* (ME) yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menanggung pengeluaran yang tinggi dalam tiap periodenya, sehingga pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan dalam kondisi yang tidak atau kurang efisien. Tingginya jumlah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan *asset* tersebut dapat mengganggu pembiayaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan probabilitas pemerintah daerah tersebut untuk mengalami *financial distress* tinggi. *Level of capital outlay ratio* (LCO) merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran modal terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

pengeluaran modal yang tinggi atas jumlah pendapatan daerah. Tingginya angka rasio ini memberi penggambaran bahwa tinggi pula probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H_{3a}: Rasio efisiensi *total expenditure to revenue ratio* (ETR), *fixed cost to operating revenue* (FETOR), *debt service to asset* (DSA), *maintenance effort* (ME) dan *level of capital outlay ratio* (LCO) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

4. Pengaruh Rasio Hutang Terhadap *Financial Distress*

Beberapa penelitian pada sektor publik yang menggunakan rasio kewajiban telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ryan et al. (2000) menggunakan indikator kewajiban pemerintah berupa *indebtedness* dengan hasil bahwa *indebtedness* berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, Cohen (2006) menggunakan rasio terkait kewajiban keuangan pemerintah berupa *current ratio*, *debt to equity ratio*, *long term liabilities to total assets* terkait kinerja pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian ini adalah bahwa rasio hutang pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah pendapatan serta jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Plammer et al. (2007) menggunakan rasio kewajiban dalam terkait risiko kegagalan pemerintah. Rasio hutang yang digunakan meliputi *UNA*, *RNA_DEBT*, *RNA_OTHER*, *CL_{GW}* dan *CL_{FUND}*. Bukti empiris dari penelitian ini adalah bahwa *CL_{GW}* dan *RNA_DEBT* tidak berpengaruh

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

pada risiko kegagalan keuangan pemerintah. Sementara itu, untuk rasio hutang pemerintah lain: UNA , RNA_OTHER dan CL_{FUND} berpengaruh terhadap risiko kegagalan pemerintah. Jones dan Walker (2007) menggunakan rasio hutang pemerintah $DEBTA$, $TLTA$, $CACL$ dan $CIBL$ dalam prediksi *local government distress*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio hutang pemerintah yang digunakan dalam penelitian tersebut mempunyai pengaruh terhadap *local government distress*. Penelitian ini menggunakan rasio hutang *current liquidity government wealth* (CL_{GW}), *current liquidity fund* (CL_{FUND}) sebagaimana digunakan Palmmer et al. (2007), *liquidity* (LQ), *current liabilities* (CL), *long term debt to total asset* ($LTDA$) dan *debt to revenue* (DTR) seperti yang digunakan Cohen (2006). Penggunaan rasio hutang ini didasarkan pada ketersediaan data dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini.

Hutang pemerintah merupakan bagian penting dalam pendanaan. Hutang pemerintah dapat digunakan sebagai penopang dalam pembiayaan pembangunan di daerah jika pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dana pemerintah daerah (Halim dan Damayanti, 2008). Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Hutang yang terjadi pada sektor publik/pemerintah berbeda dengan hutang pada sektor swasta. Hal ini berimplikasi pada jumlah hutang dan bunga pinjaman pemerintah daerah. Jumlah hutang yang tinggi bukan jaminan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan pinjaman. Semakin tinggi jumlah hutang pemerintah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*, sehingga pemerintah daerah yang mengalami *financial distress*

berkecenderungan untuk mempunyai jumlah hutang yang lebih kecil bila dibanding pemerintah daerah *non financial distress*. Oleh karena itu hipotesis keempat dalam penelitian yang dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H_{4a}: Rasio hutang pemerintah *current liquidity government wealth* (CL_{GW}) *current liquidity fund* (CL_{FUND}) *liquidity* (LQ) *current liabilities* (CL) *long term debt to total asset* (LTDA) dan *debt to revenue* (DTR) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

B. METODA PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan dipublikasi melalui *website* www.bpk.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (Sekaran, 2003). Kriteria dan hasil pengambilan sampel dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Insert Tabel 1

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampel penelitian adalah sejumlah 232 laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 148 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2006 dan 84 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2007.

2. Data Dan Sumber Data



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari catatan atau basis data baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* yang diperoleh dari hasil *download* pada *website* dan dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu www.bpk.go.id dan sumber lain yang terkait.

3. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas pemerintah daerah untuk *financial distress* dan *non financial distress* berdasar Peraturan Pemerintah No. 54/2005 Tentang Pinjaman Daerah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat melakukan pinjaman daerah adalah nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Untuk pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR < 2,5$ tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, maka dinyatakan mengalami *financial distress* dan dilambangkan dengan angka 0, sementara untuk pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR > 2,5$ dinyatakan dalam kondisi *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1.

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah angka-angka rasio dalam laporan keuangan daerah yaitu berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio sebagaimana digunakan dalam penelitian Steven dan McGowen (1983), Groves et al. (2001) dan Cohen (2006) serta Plammer et al. (2007). Rasio yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan data dan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Rasio-rasio yang digunakan sebagai variabel independen tersaji dalam tabel berikut ini.

Insert tabel 2

4. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *binary logistic regression*. Model *binary logistic regression* merupakan regresi dengan dua kategori (*binary*) (Ghozali, 2006). Pengujian dengan *binary logistic regression* mengesampingkan asumsi normalitas data penelitian, karena variabel penelitian merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (*non metrik*) sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2006). Selain itu, model penelitian ini juga mengesampingkan asumsi klasik yang terdiri dari heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas (Ghozali, 2006).

Model persamaan *binary logistic regression* yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

$$\text{Ln} \frac{P}{P-1} = \beta_0 + \beta_1 \text{PER}_{\text{GW}} + \beta_2 \text{PER}_{\text{FUND}} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{ROA} + \beta_5 \text{PM} + \beta_6 \text{POS}_{\text{GW}} + \beta_7 \text{POS}_{\text{FUND}} + \beta_8 \text{DSA} + \beta_9 \text{ME} + \beta_{10} \text{LCO} + \beta_{11} \text{ETR} + \beta_{12} \text{FETOR} + \beta_{13} \text{CL}_{\text{GW}} + \beta_{14} \text{CL}_{\text{FUND}} + \beta_{15} \text{LQ} + \beta_{16} \text{CL} + \beta_{17} \text{LTD} + \beta_{18} \text{DTR}$$

Notasi : (lihat tabel 2)

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Insert Tabel 3

Tabel 3 menunjukkan bahwa di antara kedua kelompok sampel dalam penelitian yaitu pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dan pemerintah daerah *non financial distress* mempunyai perbedaan rata-rata rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok mempunyai profil yang tidak sama sehingga sesuai dengan pernyataan Foster (1994), variabel yang berbeda tersebut dapat digunakan dalam pengujian probabilitas *financial distress*.

2. Analisis Data

a. Pengujian data Satu Tahun

Hasil pengujian hipotesis untuk data satu tahun menunjukkan bahwa *Likelihood* sebesar 39,783 dan *sig.* 0,002 yang lebih kecil $\alpha = 0,05$ dan 0,1. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen memperbaiki model *binary logistic regression* penelitian ini. Nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* adalah sebesar 8,172 dengan *sig.* sebesar 0,417 sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi observasi dalam penelitian. Untuk Uji Nilai *Nagelkerke R²* hasil menunjukkan angka sebesar sebesar 0,216 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dalam hal ini *financial distress* dan *non financial distress* dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 21,6%. Sementara itu, variabilitas sisanya sebesar 78,4% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai parameter *binary Logistic Regression* dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Insert Tabel 4

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel ROA adalah 0,066 dan nilai probabilitas untuk variabel POS_{GW} adalah sebesar 0,065 dan untuk variabel LQ adalah 0,083 serta untuk variabel CL_{GW} adalah sebesar 0,076. Nilai probabilitas untuk keempat variabel tersebut di bawah $\alpha = 0,1$, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ROA, CL_{GW}, LQ dan CL berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%. Untuk variabel CL dan LTDA mempunyai nilai probabilitas 0,036 dan 0,037 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga untuk variabel CL dan LTDA juga berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 5%.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa untuk variabel PER_{GW}, PER_{FUND}, ROE, PR, POS_{FUND}, DSA, ME, LCO, ETR, FETOR, CL_{FUND} dan DTR mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 dan 0,1. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel PER_{GW}, PER_{FUND}, ROE, PR, POS_{FUND}, DSA, ME, LCO, ETR, FETOR, CL_{FUND} dan DTR berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan, tetapi tidak pada signifikansi baik 1%, 5% maupun 10%.

b. Pengujian Data Dua Tahun

Nilai *Likelihood* yang ditunjukkan dengan nilai -2LogL sebesar 29,152 dan nilai ini signifikan 0,047 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 sehingga penambahan variabel independen dapat memperbaiki model *fit* dalam model regresi penelitian ini. Untuk nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan angka sebesar 1,647 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,990 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 dan 0,1 sehingga model penelitian ini adalah *fit* dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi observasi dalam penelitian. Nilai *Nagelkerke R²* adalah sebesar 0,401 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dalam hal ini *financial distress* dan *non distress* dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian sebesar 40,1%. Sementara itu, variabilitas sisanya sebesar 59,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai Parameter *binary logistic regression* dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Insert Tabel 5

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel PER_{GW} , LCO, ME, LTDA dan DTR mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan 0,1. Sehingga berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah untuk dua periode setelah tahun penerbitan laporan. Sementara itu, untuk variabel PER_{FUND} , ROE, ROA, PR, POS_{GW} , POS_{FUND} , DSA, ETR, FETOR, CL_{GW} , CL_{FUND} , LQ dan CL mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan 0,1. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel PER_{FUND} , ROE, ROA, PR, POS_{GW} , POS_{FUND} , DSA, ETR, FETOR, CL_{GW} , CL_{FUND} , LQ dan CL berpengaruh terhadap



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia untuk periode dua tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak pada signifikansi 1%, 5% maupun 10%.

3. Pembahasan

Hasil penelitian dalam pengujian prediksi satu tahun menunjukkan bahwa ROA mempunyai tanda koefisien regresi positif dan konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah yang menghasilkan surplus yang tinggi sehingga mempunyai ROA yang tinggi mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*. Hal ini didasarkan pada sistem penilaian anggaran pemerintah yang menggunakan konsep *value for money* (VFM). Kinerja anggaran dinilai berdasarkan pada efisiensi, efektifitas dan ekonomis, sehingga jika suatu pemerintah melaporkan surplus anggaran, pemerintah tersebut memenuhi kinerja anggaran secara ekonomis, tetapi belum tentu mempunyai kinerja anggaran yang baik dilihat dari aspek efektifitas maupun efisiensi. Selain itu, dalam sistem anggaran pemerintah Indonesia, surplus anggaran pemerintah harus dikembalikan pada kas negara, dan pengajuan anggaran pemerintah daerah tahun berikutnya tidak boleh melebihi realisasi anggaran tahun terjadinya surplus anggaran tersebut. Konsekuensi ini tentunya berpengaruh pada ketersediaan dana bagi pembangunan daerah dan membawa kesulitan keuangan bagi pemerintah daerah untuk tahun berikutnya.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Tanda koefisien untuk variabel POS_{GW} adalah negatif yang sesuai dengan tanda koefisien yang diharapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan rasio POS_{GW} yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk mengalami *financial distress* yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mempunyai rasio POS_{GW} yang rendah. Rasio POS_{GW} yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai rasio POS_{GW} yang tinggi mempunyai pendapatan yang tinggi, sehingga selain mampu membiayai kegiatan operasi juga mampu melakukan pendanaan *asset* daerah dalam aktiva tetap tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Koefisien regresi untuk variabel rasio hutang pemerintah yang diukur dengan CL_{GW} , LQ , CL dan $LTDA$ mempunyai tanda negatif dan konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis. Tanda koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka rasio CL_{GW} , LQ , CL dan $LTDA$ semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil revidu atas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan bahwa hutang pemerintah yang dilakukan pada pihak ketiga (perbankan dan kreditur lain) dalam jumlah yang relatif kecil. Hutang pemerintah sebagian besar dilakukan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, bunga dan pembayaran pokok hutang tersebut menjadi lebih fleksibel. Adanya hal ini berimplikasi pada jumlah hutang pemerintah yang besar dalam rangka pendanaan pembangunan daerah. Hutang pada pemerintah pusat ini menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendanaan dalam pembangunan daerah guna dapat menghasilkan pelayanan yang baik bagi publik. Semakin tinggi jumlah hutang pemerintah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

financial distress, sehingga pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* berkecenderungan untuk mempunyai jumlah hutang yang lebih kecil bila dibanding pemerintah daerah *non financial distress*.

Hasil pengujian *binary logistic regression* untuk variabel PER_{GW} , PER_{FUND} , PR, ROE, POS_{FUND} , DSA, ME, ETR, FETOR, LCO, CL_{FUND} dan DTR menunjukkan bahwa keduabelas variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada tingkat keyakinan 90% dan 95% serta 99%.

Sementara itu, hasil pengujian regresi data dua tahun menunjukkan bahwa terdapat empat variabel rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai prediksi *financial distress* pemerintah daerah yaitu PER_{GW} , LCO dan LDTR dan DTR. Koefisien regresi untuk variabel PER_{GW} adalah negatif dan tidak sesuai dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis. Hasil ini didasari oleh kemungkinan bahwa untuk pemerintah daerah yang mengalami surplus akan berusaha untuk menurunkan jumlah surplusnya pada tahun berikutnya, sehingga pada dua tahun setelahnya akan kembali memperoleh pendanaan yang cukup dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Tanda koefisien untuk variabel LCO adalah positif yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi inefisiensi sehingga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*.

Tanda koefisien untuk LTDA dan DTR koefisien regresi telah sesuai dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis yaitu bertanda koefisien negatif. Kedua variabel rasio hutang

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

pemerintah LTDA dan DTR menggunakan jumlah hutang jangka panjang pemerintah daerah yang membutuhkan pengembalian atau pengeluaran dalam jangka panjang pula. Hasil penelitian ini konsisten dengan logika teori bahwa tinggi rendahnya rasio keuangan yang menggunakan angka jumlah hutang jangka panjang mempengaruhi *financial distress* dan oleh karena hutang jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, maka nilai prediksi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan (tahun 2005 memprediksi tahun 2007).

Selain PER_{GW} , LCO, LTDA dan DTR, hasil pengujian prediksi dua tahun menunjukkan hasil yang membuktikan bahwa variabel PER_{FUND} , ROA, ROE, PR, POS_{GW} , POS_{FUND} , DSA, ME, ETR, FETOR, CL_{GW} , CL_{FUND} , dan LQ serta CL tidak berpengaruh pada *financial distress* dua tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai relevan terkait dengan kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia. Simpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model penelitian dengan *binary logistic regression* yang menunjukkan bahwa variabel ROA, POS_{GW} , CL_{GW} , CL dan LTDA berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada periode satu tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan. Untuk pengujian prediksi *financial distress* dua tahun



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah membuktikan bahwa variabel PER_{GW} , LCO, LTDA dan DTR berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

2. Keterbatasan, Implikasi dan Saran

Penelitian ini tidak menggunakan variabel *non* keuangan yang diduga berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menguji *financial distress* tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, seperti ukuran daerah dan status daerah. Penelitian ini hanya menggunakan periode satu tahun dan dua tahun setelah pelaporan.

Hasil penelitian berimplikasi bagi KSAP untuk dapat melakukan perbaikan standar dan usaha dalam sosialisasi dan implementasi sehingga tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara penuh dapat tercapai. Hasil ini membawa implikasi bagi manajemen pemerintah daerah untuk meminimalisasi surplus anggaran sehingga dapat mengurangi probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Selain itu, usaha meminimalisasi probabilitas *financial distress* dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman daerah untuk menutup kekurangan dana dalam pembangunan daerah. Bagi legislator untuk menggunakan variabel rasio ROA, POS_{GW} , CL_{GW} , CL, PER_{GW} , LCO dan LTDA serta DTR dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan atau menyetujui keputusan terkait pengajuan pinjaman daerah oleh pemerintah daerah agar keputusan pinjaman daerah diambil dan disetujui tidak menjadikan pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Informasi yang dapat digunakan bahwa rasio kinerja keuangan

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

(ROA dan PER_{GW}) berpengaruh positif terhadap *financial distress*, begitu pula untuk variabel efisiensi (LCO) dan rasio hutang pemerintah (CL_{GW} , CL dan LDTA serta DTR). Bagi kreditur, investor dan lembaga donasi untuk menggunakan informasi bahwa ROA dan PER_{GW} tinggi memberi indikasi bahwa pemerintah tersebut mempunyai surplus yang tinggi dan mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*. Selain itu, kreditur, investor dan lembaga donasi perlu untuk melakukan rewiu hutang pemerintah secara mendalam mengingat hutang pemerintah mempunyai sifat yang berbeda dengan hutang di sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Edward I, 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4): 137-152.
- Barnes, P. 1987. The Analysis and Use of Financial Ratio; A Review Article. *Journal of Bussines, Finance and Accounting*. 14: 449-461.



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal. *Annual Conference*. 5th. HFAA. Thessaonica.
- Foster, George. 1994. *Financial Statement Analysis*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gordon, G dan Jordan, C. 1988. Predicting Financial Distress of Texas Savings and Loans. *Southwest Journal of Business and Economics*. 5: 21-64.
- Groves. S. Godsey, dan Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association*. 9: 243-255.
- Halim, Abdul dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai*. BPF. Yogyakarta.
- Ingram, R. W., K. K. Raman dan E. R., Wilson. 1987. Governmental Capital Market Research in Accounting: A Review. *Research in Governmental and Non Profit Accounting*. 3: 98-97.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Ohlson, J., 1980. Financial Ratio and Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*. 18(1): 109-131.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2005. *Tentang Pinjaman Daerah*.
- , Nomor: 24. 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Plammer, E., Hutchison, P., dan Patton, T. 2007. GSAB No. 34's Government Financial Reporting Model: Evident on Its Information Relevan. *The Accounting Review*. 82(1): 205-240.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. Predicting *Financial distress*. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Reck, J. L., E., R, Wilson, D. Gotlob, dan M. Lawrence. 2004. Government Capital Markets Research in Accounting: A Review. Extension and Directions Future. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*. 11: 1-33.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Ryan, Christine, Dunstan, Keitha dan Brown, Jenet. 2002. The Value of Public Sector Annual Reports and Annual Reporting Awards in Organisational Legitimacy” *Accounting, Accountability and Performance*. 8(1): 61-76.

_____, dan Robinson, Marc dan Grigg, Trevor. 2000. Financial Performance Indicators for Australian Local Governments. *Accounting, Accountability and Performance* 6(2): 89-106.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley & Sons, inc.

Steven, J., dan McGowen, R. 1983. Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective. *Policy Study Rivew*. 2(3): 33-51.

Zu’amroh, Surroh. 2005. *Perbandingan Ketepatan Klasifikasi Prediksi Kepailitan Berbasis Akrual dan Berbasis Aliran Kas*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII. Solo. 15-16 September.

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

LAMPIRAN

TABEL 1 Pemilihan Sampel Penelitian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2005-2007.	1133
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2005-2007 yang mempunyai <i>adverse opinion</i> dan <i>disclamer opinion</i> .	(521)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2005 -2007 yang tidak menyajikan hutang jangka panjang.	(363)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2005-2007 yang menyajikan data dan informasi secara tidak lengkap.	(27)
Jumlah observasi dalam penelitian.	232

Sumber: www.bpk.go.id

TABEL 2 Variabel Penelitian

VARIABEL	KODE	FORMULA
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	DSCR	$\frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL}$
<i>Performance Government Wealth</i>	PERF _{GW}	$\frac{\text{Total Revenue} - \text{Total Expenditure}}{\text{Total Revenue}}$
<i>Performance Fund</i>	PER _{FUND}	$\frac{\text{Total Revenues} - \text{Total Expenditures}}{\text{Total Fund Revenues}}$
<i>Return on equity</i>	ROE	$\frac{\text{Net Surplus (Deficit)}}{\text{Total Equity}}$
<i>Return on asset</i>	ROA	$\frac{\text{Net Surplus (deficit)}}{\text{Total Assets}}$
<i>Profit margin</i>	PM	$\frac{\text{Net Surplus (deficit)}}{\text{Net Operating Revenues}}$
<i>Position Government</i>	POS _{GW}	$\frac{\text{Total Net Assets}}{\text{Total Revenues}}$
<i>Position Fund</i>	POS _{FUND}	$\frac{\text{Total FUND Balance}}{\text{Total Fund Revenues}}$

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

<i>Debt Service to Asset</i>	DSA	$\frac{\text{Net Direct Debt Service}}{\text{Assets Valuation}}$
<i>Maintenance effort</i>	ME	$\frac{\text{Repair and Maintenance Expenditures}}{\text{Total Assets}}$
<i>Level of Capital Outlay</i>	LCO	$\frac{\text{Capital Outlay from Operating Fund}}{\text{Net Operating Expenditures}}$
<i>Total Expenditure to Total Revenue</i>	ETR	$\frac{\text{Total Expenditures}}{\text{Total Revenues}}$
<i>Fixed Expenditure to Operating Revenues</i>	FETOR	$\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{Net Operating Revenues}}$
<i>Current Liability Government Wealth</i>	CL _{GW}	$\frac{\text{Current Liabilities not the Current of Long Term Liabilities}}{\text{Total Revenues}}$
<i>Current Liability Fund</i>	CL _{GW}	$\frac{\text{Fund Liabilities}}{\text{Total Fund Revenues}}$
<i>Liquidity</i>	LQ	$\frac{\text{Cash and Short Investment}}{\text{Current Liabilities}}$
<i>Current Liabilities</i>	CL	$\frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Net Operating Revenues}}$
<i>Long Term Debt to Total Asset</i>	LDTA	$\frac{\text{Net Long Debt}}{\text{Assets Valuation}}$
<i>Debt to Revenue</i>	DTR	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Revenues}}$
<i>Koefisien regresi</i>	$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots, \beta_{18}$	
$\text{Ln} \frac{P}{P-1}$	Probabilitas pemerintah daerah untuk <i>financial distress</i> dan <i>non financial distress</i>	

TABEL 3 Deskriptif Statistik

Tahun 2005

Var	NON FINANCIAL DISTRESS (1), (N = 96)				FINANCIAL DISTRESS (0), (N = 52)			
	Min	Max	Mean	St. Dev	Min	Max	Mean	St.Dev
PER _{GW}	0,003	4,219	0,202	0,514	0,005	0,984	0,143	0,209
PER _{FUND}	0,002	8,389	1,417	1,819	0,014	7,910	1,216	1,685
ROE	0,000	0,400	0,043	0,066	0,000	0,848	0,061	0,131
ROA	0,000	0,894	0,159	0,241	0,001	0,928	0,104	0,182
PM	0,004	11,690	1,602	2,358	0,007	11,450	1,553	2,150

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

POS _{GW}	0,125	27,512	3,841	4,697	0,395	49,765	6,205	10,272
POS _{FUND}	0,008	485,941	63,553	81,255	0,124	774,364	76,520	148,386
DSA	0,000	1,001	0,128	0,238	0,000	1,000	0,163	0,229
ME	0,000	0,621	0,029	0,095	0,000	,360	0,028	0,074
LCO	0,000	3,272	0,845	0,410	0,004	1,000	0,764	0,338
ETR	0,015	2,912	0,964	0,463	0,027	2,762	1,097	0,593
FETOR	0,020	81,579	7,249	9,096	0,073	58,625	8,718	10,785
CL _{GW}	0,000	6,888	0,185	0,740	0,000	6,068	0,350	0,886
CL _{FUND}	0,000	17,208	0,599	1,935	0,000	11,010	0,644	1,673
LQ	0,055	759,183	68,140	137,029	0,004	750,709	92,170	166,256
CL	0,001	4,149	0,297	0,576	0,001	7,910	0,347	1,122
LTDA	0,000	0,903	0,014	0,092	0,000	0,788	0,022	0,110
DTR	0,000	1,613	0,052	0,219	0,001	4,042	0,205	0,686
Valid N (listwise)	96	96	96	96	52	52	52	52

Tahun 2006

Var	NON FINANCIAL DISTRESS (1), (N = 53)				FINANCIAL DISTRESS (0), (N = 31)			
	Min	Max	Mean	St. Dev	Min	Max	Mean	St. Dev
PER _{GW}	0,006	0,361	0,100	0,081	0,018	,939	0,132	0,167
PER _{FUND}	0,002	3,492	0,700	0,787	0,011	6,343	0,780	1,169
ROE	0,000	0,744	0,051	0,123	0,005	2,103	0,107	0,371
ROA	0,002	12,292	0,277	1,683	0,004	,128	0,038	0,029
PM	0,027	20,305	1,674	3,147	0,018	55,349	3,948	10,665
POS _{GW}	0,001	23,650	3,471	3,712	0,997	7,348	2,778	1,470
POS _{FUND}	4,623	156,489	31,619	34,746	4,018	118,231	3,363	32,360
DSA	0,000	0,798	0,034	0,124	0,000	,111	0,014	0,028
ME	0,000	0,750	0,071	0,167	0,000	,600	0,039	0,118
LCO	0,006	4,838	2,324	1,209	0,014	5,096	2,278	1,195
ETR	0,194	8,732	1,039	1,089	0,044	1,019	0,790	0,282
FETOR	0,011	24,074	7,425	5,202	0,004	76,651	9,617	13,599
CL _{GW}	0,000	1,003	0,085	0,234	0,000	1,067	0,252	0,421
CL _{FUND}	0,002	2,559	0,396	0,576	0,002	4,912	0,458	0,954
LQ	0,692	539,504	0,573	139,067	0,132	722,603	1,033	180,186
CL	0,000	3,068	0,367	0,779	0,000	8,803	1,085	1,738
LTDA	0,000	4,662	0,564	0,815	0,000	3,606	1,080	1,318
DTR	0,000	2,020	0,436	0,532	0,000	4,005	0,263	0,763
Valid N (listwise)	53	53	53	53	31	31	31	31

Sumber : Hasil pengolahan data

TABEL 4 Hasil Uji Data Satu Tahun

VARIABLE	Exp. Sig.	B	S.E.	Wald	Sig.
PER _{GW}	+	0,496	0,832	0,356	0,551
PER _{FUND}	+	0,188	0,135	1,943	0,163
ROE	+	-1,292	1,131	1,305	0,253

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

ROA	+	1,914	1,043	3,369	0,066***
PM	+	-0,033	0,042	0,604	0,437
POS _{GW}	-	-0,052	0,028	3,394	0,065***
POS _{FUND}	-	-0,003	0,002	2,014	0,156
DSA	+	-0,267	0,807	0,109	0,741
ME	+	0,765	1,351	0,320	0,571
LCO	+	0,263	0,170	2,384	0,123
ETR	+	0,112	0,217	0,269	0,604
FETOR	+	0,003	0,019	0,019	0,891
CL _{GW}	-	-0,671	0,378	3,157	0,076***
CL _{FUND}	-	0,211	0,156	1,820	0,177
LQ	-	-0,001	0,001	3,009	0,083***
CL	-	-0,442	0,212	4,366	0,037**
LTDA	-	-0,527	0,252	4,386	0,036**
DTR	-	-0,046	0,288	0,025	0,873
Constant		0,675	0,443	2,319	0,128
<p>Nilai likelihood = 39,783, sig. 0,002 Nilai Hosmer and Lemeshow's = 8,172, sig. 0,417 Nilai negeterke R² = 0,216 ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, ***signifikan pada $\alpha = 10\%$ Sumber: hasil pengolahan data</p>					

TABEL 5 Hasil Pengujian Data Dua Tahun

VARIABLE	Exp. Sig.	B	S.E.	Wald	Sig.
PER _{GW}	+	-6,556	3,958	2,744	0,098***
PER _{FUND}	+	-0,026	0,144	0,034	0,855
ROE	+	0,581	1,521	0,146	0,702
ROA	+	10,878	9,294	1,370	0,242
PM	+	0,045	0,292	0,024	0,876
POS _{GW}	-	0,166	0,172	0,940	0,332
POS _{FUND}	-	0,000	0,001	0,363	0,547
DSA	+	0,006	2,385	0,000	0,998
ME	+	-0,192	1,137	0,028	0,866
LCO	+	3,674	1,332	7,606	0,006*
ETR	+	0,552	0,461	1,433	0,231
FETOR	+	-0,049	0,039	1,543	0,214
CL _{GW}	-	-0,501	7,855	0,004	0,949
CL _{FUND}	-	-0,016	0,035	0,195	0,659
LQ	-	-0,002	0,002	0,981	0,322
CL	-	-0,843	0,815	1,070	0,301
LTDA	-	-10,546	0,696	4,931	0,026**
DTR	-	-0,591	0,329	3,220	0,073***
Constant		4,346	1,593	7,439	0,006
<p>Nilai likelihood = 29,152, sig. 0,047</p>					

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

Nilai *Hostmer and Lemeshow's Goodness* = 1,647, sig. 0,990

Nilai *negelkre R²* = 0,401

* signifikan pada $\alpha = 1\%$ ** signifikan pada $\alpha = 5\%$, ***signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: hasil pengolahan data